



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERIZINAN PENYIARAN RADIO BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG
PERSYARATAN TATA CARA PERIZINAN PENYIARAN
RADIO DI KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)*



Oleh

**SILVIA EFENDI
11527203137**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1441 H/2019 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *"Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio Di Kabupaten Kampar"*

Nama : Silvia Efendi

NIM : 11527203137

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Agustus 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. Abu Samah, SH., MH.
NIK. 130112055

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, “Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio Di Kabupaten Kampar” yang ditulis oleh :

Nama : SILVIA EFENDI
NIM : 11527203137
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2019
Waktu : Jam, 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Oktober 2019
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH.

Sekretaris
Joni Alizon, SH., MH.

Penguji 1
Muslim, S.Ag., SH., M.Hum.

Penguji 2
Dr. H. Abu Samah, MH.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SILVIA EFENDI**
 NIM : 11527203137
 Tempat / Tanggal Lahir : Bukittinggi, 27 Februari 1996
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio Di Kabupaten Kampar”**, adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat dari hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan

Silvia Efendi

SILVIA EFENDI
NIM: 11527203137

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dr. Abu Samah, SH., MH.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 05 Agustus 2019

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Silvia Efendi

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Surya Ningsih Damanik, yang berjudul **"Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio Di Kabupaten Kampar"** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing

Dr. Abu Samah, SH., MH.
NIK. 130112055

UIN SUSKA RIAU

Silvia Efendi (2019): Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio Di Kabupaten Kampar.

Perizinan adalah simpulan utama dari peraturan mengenai penyiaran, perizinan menjadi tahap keputusan dari negara melalui KPI untuk memberikan penilaian apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau meneruskan hak sewa atas frekuensi. Mengingat masih ada lembaga penyiaran radio yang belum melaksanakan perizinan penyiaran radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio. Setiap lembaga penyiaran radio wajib memperoleh IPP dalam melaksanakan penyiaran radio.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Radio di kabupaten Kampar dan apa saja faktor penghambat yang terjadi dalam Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Radio di kabupaten Kampar.

Penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dimasyarakat. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Komisioner KPID (Bidang Perizinan) Provinsi Riau, Kepala Seksi Pemantauan dan Penertiban Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru, Sektetaris dan Pegawai Koordinator Radio Islamic FM Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perizinan penyiaran radio harus sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Radio, pada kenyataannya masih terdapat beberapa lembaga penyiaran radio yang belum melakukan perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ada beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam perizinan penyiaran radio seperti kurangnya partisipasi dari perwakilan lembaga penyiaran untuk menghadiri sosialisasi yang diberikan KPID Provinsi Riau, ketidak pahaman calon lembaga penyiaran radio terhadap prosedur penyiaran radio, pembentukan badan hukum yang membutuhkan waktu dan proses yang lama untuk membentuk dan mengurusnya, dan masalah biaya. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu Pelaksanaan Perizinan Radio di Kabupaten Kampar belum terlaksana karena masih terdapat beberapa radio yang belum memiliki izin tetapi masih tetap melakukan penyiaran dan menggunakan frekuensi radio.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan`nikmat yang tidak terkira dan tidak terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul **“Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio di Kabupaten Kampar”**. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW. semoga kita mendapat syafa'at beliau di yaumil akhir kelak, Aamiin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan beberapa hambatan serta kesulitan dalam penulisan skripsi ini juga, penulis telah banyak mendapat dukungan berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Elva Efendi dan Ibunda tercinta Erliwati yang do'a, nasehat, petuah kebajikan, tunjuk ajar serta dukungan yang tak terhingga senantiasa mengalir tiada henti-hentinya kepada anak-anaknya, semata-mata agar anaknya menjadi orang yang berguna, dan berakhlak mulia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seluruh keluarga tercinta, Terkhusus Untuk adik kandung Mutia Efendi, S.Ak., Fadel Efendi, Naqqia Salsabila Efendi, kakak Yossi Ramanda, Amd. farm., abg Riski Sarandi, S.E, Rinaldo Oktaviano, S.H dan Keluarga Besar, yang selalu memberikan motivasi, do'a, serta dukungan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
5. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
6. Bapak Wahidin, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
7. Bapak Dr. Maghfirah, M.A, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
8. Bapak Firdaus, SH., MH, selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum beserta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen yang dengan tulus ikhlas dalam memberikan pengajaran proses transfer ilmu serta bimbingan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Muslim, S.Ag. SH., M.Hum, selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen yang dengan tulus ikhlas dalam memberikan pengajaran proses transfer ilmu serta bimbingan.

10. Bapak Dr. Abu Samah, SH., MH, sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

11. Teruntuk teman – teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, nasehat, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT, dengan sebaik-baik balasan didunia maupun akhirat kelak.
Aamiin ya Robbal 'alamin.

Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis yang akan datang.

Assalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 05 Juli 2019

Penulis

SILVIA EFENDI
NIM. 11527203137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| DAFTAR BAGAN | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 6 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| E. Metode Penelitian..... | 8 |
| F. Sistematika Penulisan | 13 |
| BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| A. Sejarah Kabupaten Kampar | 15 |
| B. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Kampar | 16 |
| C. Sejarah KPID Provinsi Riau | 17 |
| D. Visi dan Misi KPID Provinsi Riau | 18 |
| E. Tugas dan Fungsi KPID Provinsi Riau | 20 |
| F. Strategi Kerja KPID Provinsi Riau | 22 |
| G. Sejarah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru | 24 |
| H. Visi dan Misi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru | 25 |
| I. Tugas dan Fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru | 26 |
| J. Struktur Organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru | 27 |
| K. Sejarah Radio Islamic FM Kabupaten Kampar | 30 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|----|
| L. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Radio Islamic FM Kabupaten Kampar | 31 |
| M. Struktur Organisasi Kepengurusan Radio Islamic FM Kabupaten Kampar | 33 |

BAB III TINJAUAN TEORITIS

| | |
|--|----|
| A. Teori Perizinan | 34 |
| B. Teori Penyiaran | 56 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio | 67 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan penyiaran Radio di Kabupaten Kampar | 74 |
| B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan penyiaran Radio di Kabupaten Kampar | 80 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 84 |
| B. Saran..... | 85 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

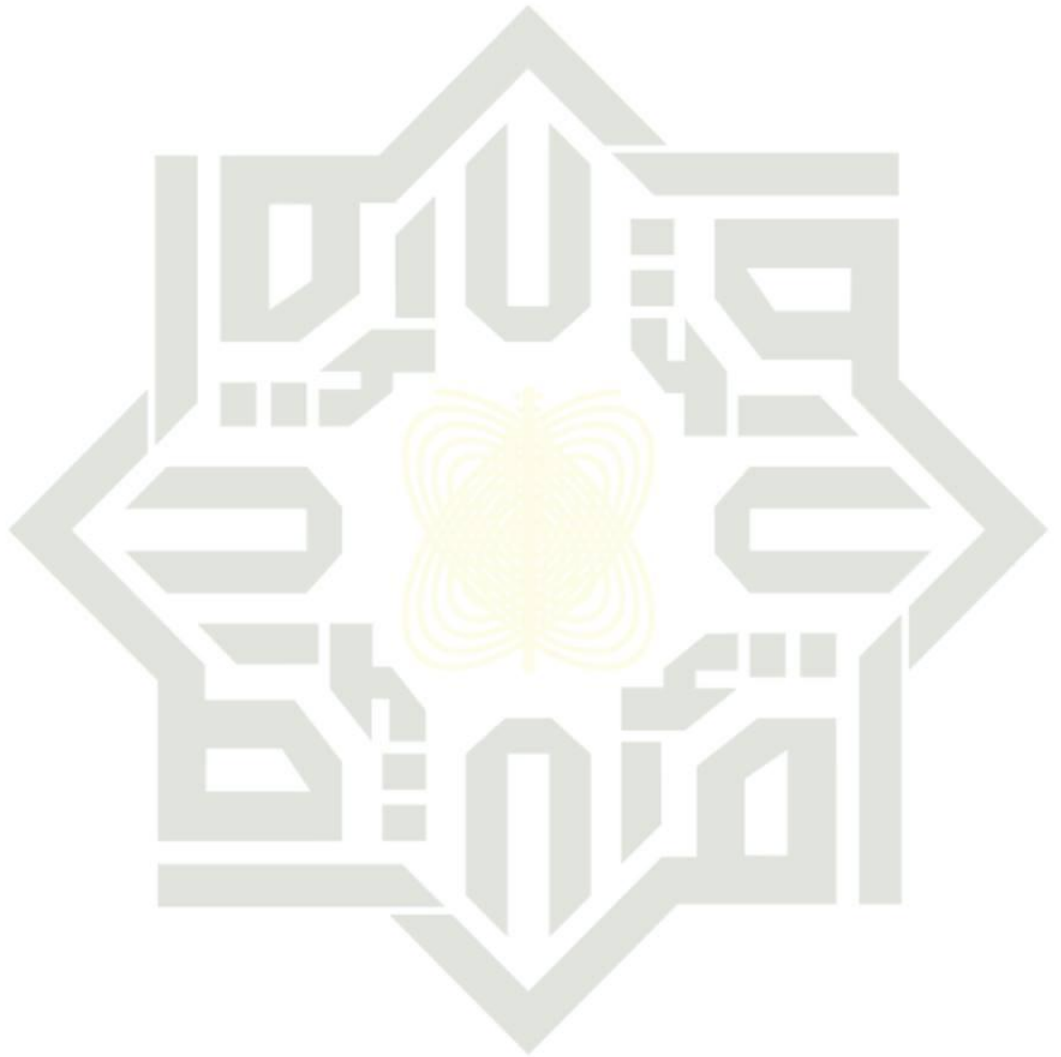


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.1 | Populasi dan Sampel | 10 |
| Tabel 4.1 | Daftar Lembaga Penyiaran Swasta (Radio) Berizin dan Yang Belum Berizin di Kabupaten Kampar | 78 |



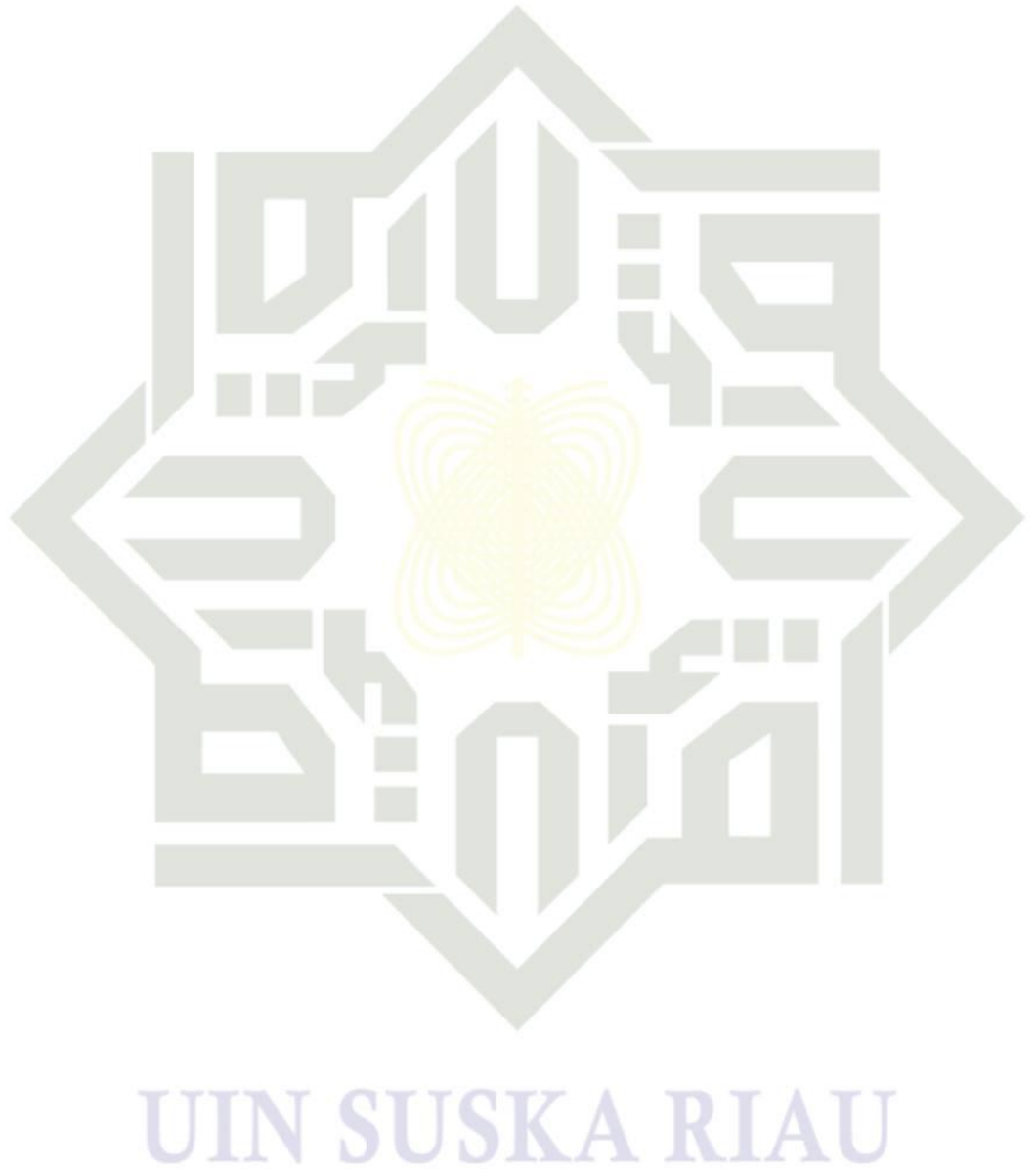
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

| | |
|---|----|
| Bagan 2.1 Struktur Organisasi KPID Provinsi Riau Periode 2017-2020 ... | 23 |
| Bagan 2.2 Struktur Organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru | 29 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada era modern kebebasan dalam berkomunikasi sangat berkembang pesat, sehingga pemerintah telah memberikan kebebasan melalui, Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencapai, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.¹

Itu berarti masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang dibutuhkan tanpa terkecuali. Kewenangan Otonomi Daerah mempunyai keleluasaan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal agama serta kewenangan di bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat. Mulai dari penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.²

Kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi

¹ Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

² Sudi Fahmi, *Hukum Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : Total Media, 2010), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitab Undang-Undang Dasar 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia. Dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besaruntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara Indonesia. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini menjadi tidak memadai. Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal.³

Menurut Ni'matul Huda, Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya.⁴ Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua proses daur kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggung jawaban dan evaluasi. Melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga Negara lainnya, karena *spectrum* pengaturannya yang saling berkaitan.

Menurut Adrian Sutedi bahwa hal utama mengenai peraturan penyiaran adalah perizinan. Izin (*verguning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga di artikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁵

³ Penjelasan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 32.

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pendapat diatas diketahui bahwa Perizinan adalah simpul utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui KPI) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggung jawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak menyimpang dari misi pelayanan informasi kepada publik. Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis (rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), substansi/format siaran (*content*), permodalan (*ownership*), serta proses dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Sementara itu dari sisi proses dan tahapan, pemberian dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran akan diberikan oleh negara setelah memperoleh:

- a. Masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
- b. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
- c. Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
- d. Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.⁶

⁶ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian izin dilakukan secara bertahap, yakni izin sementara dan izin tetap. Untuk lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama enam bulan. Sedangkan untuk lembaga penyiaran televisi, wajib melalui masa uji coba siaran paling lama satu tahun.⁷

Lembaga penyiaran yang sudah diberikan izin penyiaran, dilarang memindahtangankan (memberikan, menjual, atau mengalihkan) izin penyiaran kepada pihak atau badan hukum lain jangka waktu penggunaan izin penyelenggaraan penyiaran dibatasi dalam batas waktu tertentu.

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio di jelaskan bahwa untuk izin penyelenggaraan penyiaran radio adalah lima tahun dan untuk penyelenggaraan penyiaran televisi adalah sepuluh tahun. Apabila izin penyiaran yang diberikan sudah habis jangka waktunya, maka dapat dilakukan perpanjangan izin. Perpanjangan izin dilakukan melalui pengajuan kembali untuk kemudian dilakukan evaluasi dan verifikasi terhadap berbagai persyaratan pemberian izin.⁸

Namun kenyataannya menurut bapak warsito selaku Komisioner KPID Provinsi Riau Bidang Pengelolaan Struktur dan Penyiaran (Bidang Perizinan) pada saat ini masih ada lembaga penyiaran radio yang belum memiliki izin penyiaran, terkhususnya untuk Kabupaten Kampar. Radio yang

⁷ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17 Tahun 2005, tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

⁸ Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beroperasi dengan tanpa izin tersebut di Kabupaten Kampar itu adalah Radio Islamic FM, Radio Rama FM, Radio Hijrah FM dan Radio Ceriah FM.

Maka berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio di Kabupaten Kampar”**

B. Batasan Masalah

Agar penulis lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis memfokuskan pembahasan Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio di Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dan batasan masalah, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio di Kabupaten Kampar?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio di Kabupaten Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio di Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio.
- b. Mengetahui apa faktor penghambat pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio di Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai kajian Penelitian Hukum yaitu “Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio di Kabupaten Kampar”.
- b. Sebagai karya tulis dalam melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bagi peneliti di masa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama.

Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.⁹

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan gejala menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala-gejala yang bersangkutan.

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian seperti dibawah ini:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum Sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan maka penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru. Dipilihnya lokasi ini karena diwilayah Kota Pekanbaru terdapat KPID Provinsi Riau, Balai Monitor Sepktrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru, Radio Islamic FM yang belum memiliki izin penyiaran di Kabupaten Kampar, Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti dalam memilih lokasi ini.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek yang dapat menjadi acuan dalam mendapatkan data dalam suatu penelitian. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁰ Maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Komisioner KPID Bidang Pengelolaan Struktur dan Penyiaran (Bidang Perizinan) Provinsi Riau Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Pemantauan dan Penertiban Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru, Sekretaris dan Pegawai Koordinator Radio Islamic FM Kabupaten Kampar. Total populasi adalah 5 orang dan total sampel adalah 5 orang.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Total Sampling.

¹⁰ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers), h. 118.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

| NO | RESPONDEN | POPULASI | SAMPEL | PERSENTASE |
|----|---|----------|--------|------------|
| 1. | Komisioner KPID (Bidang Perizinan) Provinsi Riau Kota Pekanbaru | 1 | 1 | 100% |
| 2. | Kepala Seksi Pemantauan dan Penertiban Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru | 2 | 2 | 100% |
| 3. | Sekretaris dan Pegawai Koordinator Radio Islamic FM Kabupaten Kampar | 2 | 2 | 100% |
| | Jumlah | 5 | 5 | 100% |

Sumber : Data Olahan 2019

4. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa Data Primer dan Data Sekunder yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan. Data ini dapat berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan sumber lainnya. Data yang diperoleh adalah data yang diajukan sesuai dengan tujuan penelitian yang berkaitan dengan hambatan dan implikasi hukum Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio. Kemudian penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungkan dengan data yang diperoleh dengan cara wawancara segala subjek/orang pada instansi terkait atau lembaga terkait yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diperoleh data secara langsung dari tempat yang menjadi objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan Peraturan Perundang-undangan.¹¹ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah lembaga independen dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh dari ensiklopedia dan yang sejenis yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, dokumen tertulis, dan website tentang masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan melalui prosedur pencarian data, studi kepustakaan, kemudian melakukan identifikasi bahan hukum menurut permasalahan yang diajukan. Data yang ada tersebut untuk selanjutnya diinventarisasi dan sistematisasikan dengan baik dalam bab dan sub bab sesuai dengan pokok bahasan.

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: T. Rineka Cipta, 2011), h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian, yaitu deskriptif, maka dengan landasan tersebut pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Observasi

Teknik Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.¹² Penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk melihat langsung mengenai masalah yang diteliti.

- b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹³ Suatu bentuk tanya jawab secara langsung yang penulis lakukan dengan pihak yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian ini.

- c. Studi Kepustakaan

Yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Cet. Ke-2, h. 62.

¹³ Abdurrahmat Fathoni, *Op. Cit.*, h. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian sehingga akan mendapatkan hasil yang akan mendekati kebenaran yang ada. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.¹⁴

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu, penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.¹⁵

Untuk itu di dalam penelitian ini digunakan deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul berbentuk naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis dengan memaparkan data dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan-permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan memulai pembahasan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dalam permasalahan tersebut.

Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

¹⁴ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 5.

¹⁵ *Ibid*, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Yaitu berisi tentang gambaran umum yang berisikan tentang lokasi penelitian yaitu KPID Provinsi Riau Kota Pekanbaru, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru, Radio Islamic FM Kabupaten Kampar.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Berisi tinjauan umum, yakni Teori Perizinan dan Teori Penyiaran Radio, Perizinan Penyiaran Radio di dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengurai tentang hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio di Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 dan mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan perizinan penyiaran radio di Kabupaten Kampar.

BAB V : PENUTUP

Yaitu berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A Sejarah Kabupaten Kampar

Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau Indonesia. Disamping julukan *Bumi Sarimadu*, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan *Serambi Mekkah* di Provinsi Riau. Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut sungai Kampar. Berkaitan dengan *Prastasi Kedudukan Bukit*, beberapa sejarawan menafsirkan Minanga Tanvar dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai Kampar Kanan dan sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.¹⁶

Berdasarkan Sulalatus Salatin, disebutkan adanya ketertarikan Kesultanan Melayu Malak dengan Kampar, kemudian juga disebutkan Sultan Melaka terakhir (Mahmud Shah dari Malaka), setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ke tangan Portugis, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya mangkat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kmapar waktu itu telah dipimpin oleh seorang Raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau. Tomas Dias dalam ekspedisinya ke pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa ia menelusuri Sungai Siak yang kemudian sampai pada suatu kawasan, pindah

¹⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar diakses tanggal 26 April 2019, jam 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan melanjutkan perjalanan darat menuju sungai Kampar. Dalam perjalanan tersebut dia juga berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyung.

Kondisi Geografi dan Demografis Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dengan luas kurang 1. 128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000'40" Lintang Utara sampai 00027'00" Lintang Selatan dan 100028'30"-101014'30" Bujur Timur Luas Wilayah Kabupaten Kampar saat ini kurang lebih 11.289.28 KM² dari wilayah Provinsi Riau. Dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung merupakan yang memiliki wilayah terluas yakni 1.365.98 KM². Sedangkan Kecamatan Rumbio Jaya merupakan Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu 76,92 KM².

Ibu Kota Kabupaten Kampar berpusat di Bangkinang yang berjarak lebih kurang 61 KM dari Kota Pekanbaru dan terbagi dalam Kecamatan. Adapun 21 Kecamatan tersebut adalah Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Perhebtian Raja, Kecamatan Kampar, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Kampar Utara dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar berbatasan dengan daerah atau Kabupaten lain di antaranya :

- a. Sebelah Utara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
- b. Sebelah Selatan Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Sebelah Barat Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumbar)
- d. Sebelum Timur Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Pelalawan.¹⁷

Sejarah KPID Provinsi Riau

Dalam dasar Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Semangat Undang-undang ini adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 menyebutkan Komisi Penyiaran Indonesia adalah Lembaga Negara yang bersifat independen dan berada di pusat dan di daerah yang tugas wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Artinya KPID diperlukan karena spektrum frekuensi radio sumber daya alam yang terbatas yang harus dilindungi dan dijaga oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Proses demokrasi demokrasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendalian utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah

¹⁷ Profil Kabupaten Kampar Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran yaitu *Diversity of content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).

Kedua perinsip inilah yang menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI/KPID. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *Diversity of content* (prinsip keberagaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip *Diversity of Ownership* juga menjamin iklim persaingan yang sehat antar pengelolaan media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.¹⁸

Visi dan Misi KPID Provinsi Riau

a. Visi KPID Provinsi Riau

Visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau merupakan visi yang digunakan sebagai arahan kepada setiap jajaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mewujudkan visi yang

¹⁸ Warsito, Komisioner KPID Provinsi Riau (Bidang Perizinan), Wawancara, 13 Mei

¹⁹.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud, merupakan kewajiban bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau diharapkan kontribusi upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam mengakses media dan selektif dalam memilih isi siaran.

Instansi yang berperan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam mengakses media dan selektif dalam memilih isi siaran, tidak hanya dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau, tetapi juga pihak lain, baik sebagai lembaga pemerintah Daerah maupun lembaga non Pemerintah. Dalam konteks ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan bidang penyiaran di Pemerintah Provinsi, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan dibidang penyiaran.

b. Misi KPID Provinsi Riau

Makna yang terkandung dalam rumusan visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau diatas adalah sebagai berikut :

- Sehat merupakan gambaran target yang ingin dicapai adalah berharap Lembaga Penyiaran patuh dan taat terhadap peraturan soal Perizinan, transparan atas data perizinan lembaga penyiaran, dukungan atas layanan yang prima demi terciptanya iklim industri penyiaran yang sehat, dan Prioritas, Lembaga penyiaran 2020 Publik (LPP) Lokal / Radio dan Televisi Pemerintah Daerah.
- Adil dalam artian berupaya menciptakan Sistim yang inovatif dan Kreatif serta *Follow-Up* Masyarakat kepada KPID Provinsi Riau, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyiaran, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan Lembaga penyiaran untuk menjaga keutuhan NKRI (Luberan Siaran Asing) khusus nya di daerah perbatasan.

- Berkualitas dalam konsep Komisi penyiaran Indonesia Daerah Riau melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengaduan isi siaran, membangun kelembagaan KPID yang handal dan Profesional dan meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang penyiaran yang profesional.

E. Tugas dan Fungsi KPID Provinsi Riau

1. Pasal 8 ayat (3) : KPI mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
 - b. Ikut membantu pengaturan infastruktur bidang penyiaran;
 - c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
 - d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
 - e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye-lengraan penyiaran; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesional di bidang penyiaran.¹⁹

2. Fungsi Pengawasan KPID Provinsi Riau

Fungsi KPID sebagai lembaga perwujudan dan partisipasi masyarakat dalam penyiaran adalah mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Indonesia. Fungsi ini sejalan dengan asas pokok KPID sebagai lembaga Negara yang bersifat independen, yang harus melindungi masyarakat dari ketidakberdayaan menghadapi berbagai kepentingan dan kekuatan.

KPID juga menjadi semacam wadah yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran (yaitu radio dan televisi, baik publik, swasta, komunitas dan berlangganan). Hal tersebut tercermin dalam tiga macam tugas, fungsi, dan wewenang KPID secara umum dalam bidang peraturan, pengawasan, dan pengembangan sebagaimana tersebut di atas.

Dalam menjalankan fungsinya, KPID harus mengusahakan agar tercipta suatu sistem penyiaran nasional yang memberi kepastian hukum, tatanan, serta keteraturan berdasarkan atas persamaan dan keadilan. Dalam sistem yang mengedepankan peluang kepada warga negara untuk memelihara hak-hak asasi akan komunikasi dan informasi ini, pemerintah

¹⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya dalam hal penyusunan peraturan, lebih diharapkan perannya sebagai fasilitas dalam penyelenggaraan penyiaran.²⁰

Strategi Kerja KPID Provinsi Riau

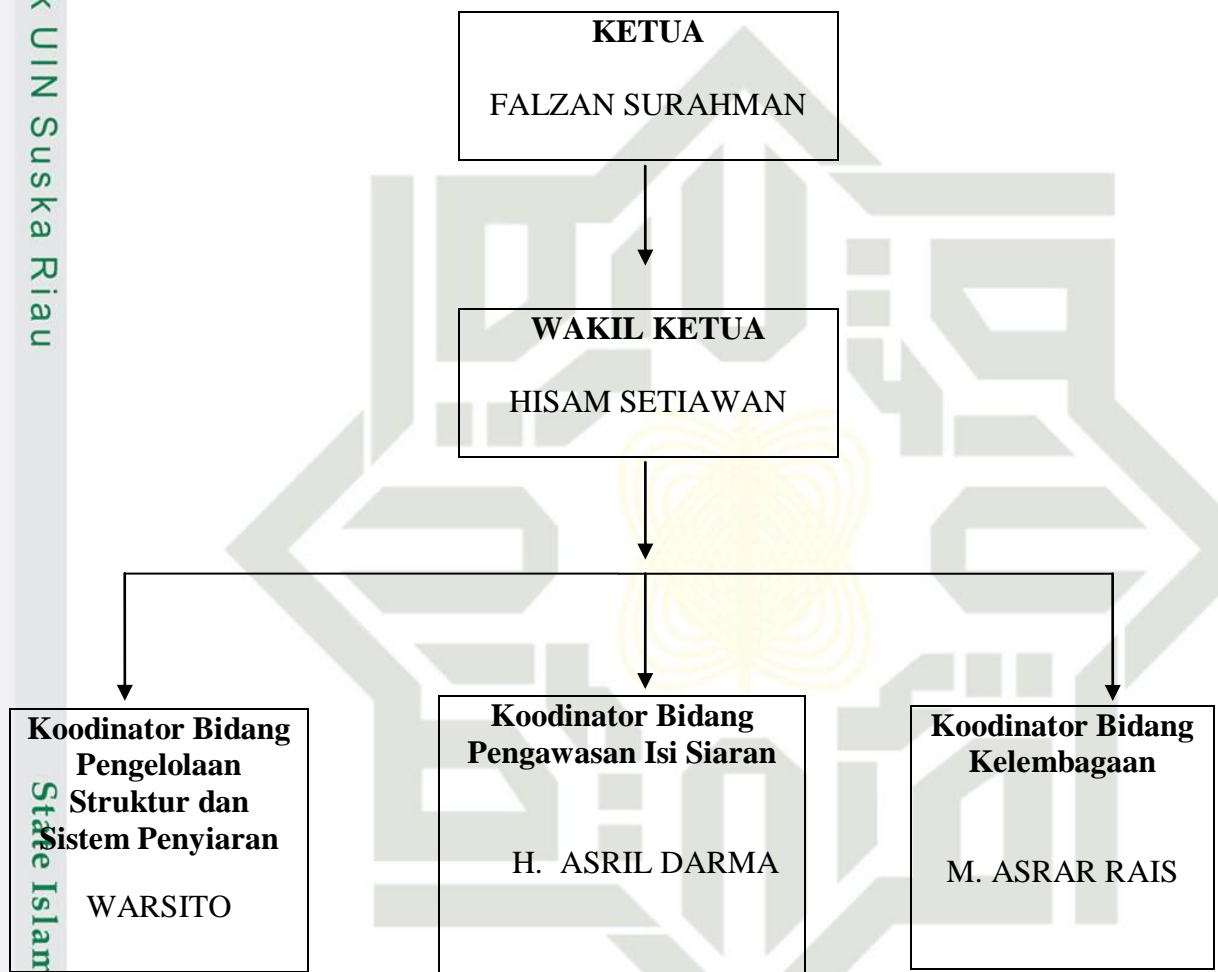
Pimpinan, Anggota dan Pegawai Kesekretariatan KPID Provinsi Riau didalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kelembagaannya berdasarkan kepada strategi kerja sebagai berikut:

- a. *Participatory*, Selalu menekankan adanya keikutsertaan pihak lain dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.
- b. *Koorperatif*, Tidak bersikap mementingkan diri sendiri dan mau berkerjasama untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban.
- c. *Komunikatif*, Mendorong dan melaksanakan komunikasi dengan individu maupun lembaga didalam maupun diluar KPID Provinsi Riau.
- d. *Problem Solving*, Bertujuan untuk dapat menyelesaikan segala masalah dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.
- e. *Program Oriented*, Melakukan tugas dan kewajiban secara terprogram dan/atau mengikuti program yang telah ditetapkan.
- f. *Holding Hand Together*, Selalu beriringan dan bekerjasama dalam kerangka kelembagaan KPID Provinsi Riau.

²⁰ *Ibid.*

BAGAN 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
KPID PROVINSI RIAU PERIODE 2017-2020

Anggota KPID Provinsi Riau 2017-2020



Sumber dari "SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU NOMOR Kpts/VII/2017
 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KPID RIAU PERIODE 2017-2020"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejarah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas sama seperti sumber daya alam yang ada di tanah dan juga air, kalau tidak dengan benar bisa merugikan warga negara. Karena terbatas maka harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 itu “ Sumber daya alam terdiri dari tanah, air, udara dan semua yang terkandung di dalamnya harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan seiring perkembangan teknologi informatika spektrum frekuensi radio makin banyak dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, agar pemanfaatan frekuensi radio tertib, teratur dan efisien (tidak boros) dan untuk mencegah timbulnya gangguan (interferensi), karena propagasi gelombang radio merambat tanpa mengenal batas wilayah atau negara, maka pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur.²¹

Dalam hal pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, pemerintah mendelegasikan kepada direktorat Sumber Daya dan Pengangkatan Pos dan Informatika Kementarian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga negara yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

²¹ Helmi Kepala Bagian Pemantauan dan Penertiban Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru Provinsi Riau, *Wawancara*, 10 Juli 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru selaku Unit Pelaksanaan Teknisi (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) di daerah mengembangkan tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah Riau.

II. Visi dan Misi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru

Untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mendukung Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika:

Visi : “Terwujudnya Indonesia Informatika menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI”.

Dari 5 misi Kementerian Komunikasi dan Informatika, misi yang diembankan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah:

1. Mewujudkan birokrasi layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi.
2. Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.²²

²² <https://www.postel.go.id> Laporan Tahunan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio diakses tanggal 11 Juli 2019, jam 16.25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas dan Fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru

Tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Bab I dan Bab II.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru mempunyai fungsi:²³

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- c. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
- d. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak penggunaan frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak penggunaan frekuensi radio;

²³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- g. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan ujian amatir radio dan;
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksanaan Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

J. Struktur Organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I

Pekanbaru terdiri dari:²⁴

1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

2) Seksi Pemantauan dan Penertiban

Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informasi, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio

²⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Seksi Sasaran dan Pelayanan

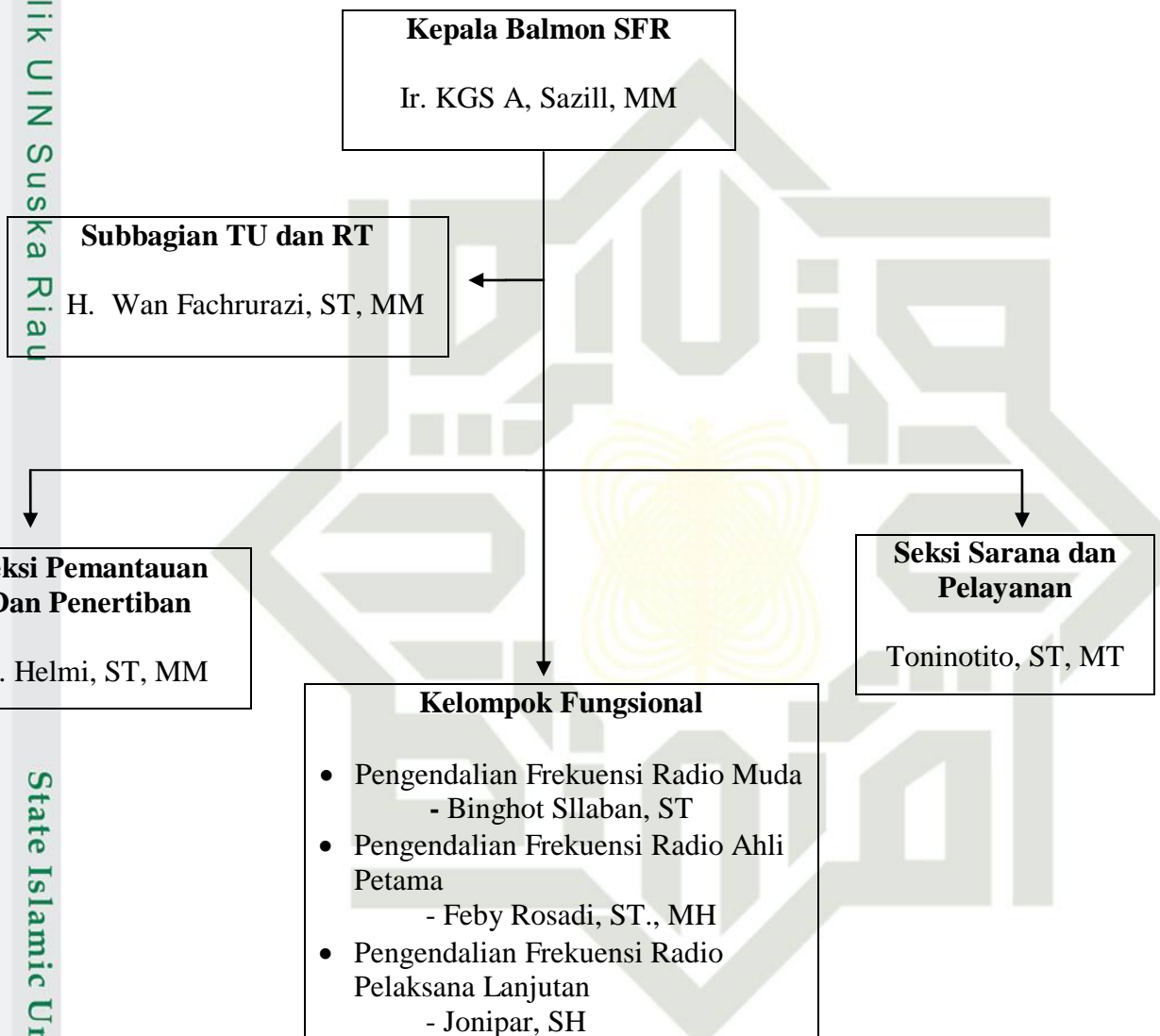
Seksi Sasaran dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

4) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



BAGAN 2.2
STRUKTUR ORGANISASI
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I
PEKANBARU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejarah Radio Islamic FM Kabupaten Kampar

Radio Islamic FM adalah salah satu sarana komunikasi khususnya pada bidang dakwah Islam. Media penyiaran radio adalah salah satu media yang efektif dalam rangka membantu mensyiarkan agama. Semangat tujuan inilah yang mengilhami pendirian Radio Islamic FM. Radio yang beralamat di Komplek Masjid Al Ihsan Markaz Islamy Kabupaten Kampar Jalan Moh. Yamin Kota Bangkinang ini pada mulanya berawal dari ide dan gagasan dari beberapa anggota kepengurusan Badan Pengelola Masjid Al Ihsan Markaz Islamy Kabupaten Kampar priode 2012-2017 yang di pimpin oleh ketua yaitu DR. Dasman Yahya Maali, Lc. MA.

Sebagai masjid yang mendapat pendanaan dari pemerintah daerah Kabupaten Kampar, Badan Pengelola Masjid Al Ihsan Markaz Islamy Kabupaten Kampar priode 2012-2017 pada saat itu di minta untuk membuat dan mengusulkan program untuk kemudian diajukan kepada Pemerintah daerah Kabupaten Kampar yang waktu itu di pimpin oleh bapak Bupati H. Jefri Noer. Maka salah satu program yang diajukan dan mendapat persetujuan adalah mendirikan radio sebagai salah satu media syiar agama dengan nama Radio Qur'an dan Dakwah.

Radio Islamic FM yang berada dibawah pengawasan dan bimbingan Biro Umum, Humas dan Kepegawaian Markaz Islamy Kabupaten Kampar memulai pengurusan pendirian dan izin operasional radio. Langkah awal nya adalah pengajuan dan pengurusan izin radio kepada pihak terkait. Sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketua dalam pengurusan izin dipimpin oleh bapak Zulkifli dan dibantu oleh jajaran dan anggotanya.

Dengan perlengkapan yang telah diadakan sebelumnya, dilakukan perekrutan pegawai berikut Tugas pokok dan fungsi masing masing dan kemudian disusunlah program dan jadwal kegiatan radio untuk selanjutnya dilakukan kegiatan penyiaran. Dengan frekuensi 90.50 FM, Radio Islamic menyiarkan tilawah Al Qur'an dan kajian kajian rutin para ustadz dari internal Masjid Al Ihsan Markaz Islamy Kabupaten Kampar maupun para ustadz dari luar baik secara live maupun rekaman.

Sampai saat ini, radio Islamic FM sudah mengudara 12 Tahun, Seiring dengan pergantian pengurus Badan Pengelola Markaz Islamy Kabupaten Kampar periode 2017-2021, kepengurusan radio Islamic FM pun mengalami perubahan struktur kepengurusan sesuai dengan hasil rapat Badan pengelola Masjid al Ihsan Markaz Islamy Kabupaten Kampar periode 2017-2021. Untuk saat ini, radio Islamic FM di pimpin oleh Bapak Zulkifli, S.Pd yang dibantu manager siaran, produksi dan operasional beserta anggota.²⁵

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Radio Islamic FM Kabupaten Kampar

Adapun visi Radio Islamic FM adalah “Menjadikan Radio Islamic FM sebagai radio dakwah untuk memperkuat Aqidah Islamiyah dan mempererat Ukhuwah Islamiyah sekaligus menjadi mitra masyarakat menuju masyarakat yang cerdas, Islamy dan cinta Agama.

²⁵ Mustafa Kamal Bagian Manajer Operasional Radio Islamic FM Kabupaten Kampar, wawancara, 11 Juli 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun misi dari Radio Islamic FM adalah sebagai berikut:

- (1) Menjadikan Radio Islamic FM sebagai media syiar dakwah untuk memperkuat aqidah dan ukhuwah Islamiyah masyarakat.
- (2) Menjadikan Radio Islamic FM sebagai media syiar dakwah yang mencerahkan bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan keagamaan yang ada.
- (3) Menjadikan Radio Islamic FM sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat.
- (4) Membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyebaran informasi.
- (5) Mendukung misi pemerintah Kota Bangkinang menuju masyarakat yang beriman dan bertaqwa.

Tujuan didirikannya Radio Islamic FM adalah sebagai berikut:

- (1) Terbentuknya masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang baik.
- (2) Menjadikan radio sebagai sarana meningkatkan pemahaman agama bagi masyarakat.
- (3) Menjadikan radio sebagai sarana belajar bagi masyarakat.
- (4) Menyajikan kajian kajian menarik dan tilawah Al Qur'an yang menyejukkan.

Strategi pencapaian tujuan Radio Islamic FM adalah:

- (1) Menyiarkan berbagai kajian rutin yang mencerahkan dari para ustadz yang telah terjadwal di masjid al ishsan markaz islamy kabupaten Kampar secara live maupun rekaman kajian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Memutar dan menyiarkan rekaman kajian kajian dari para Ustadz kondang seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Mawardi, Ustadz Mustafa Umar dan lain sebagainya.
- (3) Menyiarkan secara live maupun rekaman kajian Umat bertanya Imam menjawab sebagai sarana belajar dan meningkatkan pemahaman akan Islam.

M. Struktur Organisasi Kepengurusan Radio Islamic FM Kabupaten Kampar

Kepengurusan Radio Islamic FM Kabupaten Kampar

| | | |
|---------------------|---|-----------------|
| Direktur | : | Zulkifli |
| Komisaris | : | Tamaruddin S.Pd |
| Manajer umum | : | Islami Basri |
| Manajer siaran | : | Said Qasim |
| Anggota | : | Yurnalis |
| Manajer produksi | : | Jefriza |
| Anggota | : | Hendri |
| | : | Kamaruddin |
| Manajer operasional | : | Mustafa Kamal |
| Anggota | : | Rizky Akbar |
| | : | Romi |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A Teori Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.²⁶ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:²⁷

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu :²⁸

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya : Yuridika, 1993), h. 2.

²⁷ *Ibid.*, h. 2-3.

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).

- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesisionaris* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

2. Perizinan Menurut Undang-Undang

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Bab 1 tentang Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.²⁹

²⁹ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Bab 1 angka 35 dan 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perizinan Menurut Doktrin

- a. **N.M.Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge**, menyatakan bahwa secara umum izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan pendapat tersebut, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan atau diberi izin. Artinya, kemungkinan seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.
- b. **Van der Pot**, menyatakan bahwa izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.
- c. **Prajudi Atmosudirjo**, menyatakan bahwa izin (vergunning) adalah penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi, “dilarang tanpa izin dan seterusnya.” Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. **Syahran Basah**, menyatakan bahwa izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkrit berdasarkan persyaratan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

e. **Bagir Manan**, menyatakan bahwa izin dalam arti luas berarti persetujuan dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

f. **Ateng Syafrudin**, menyatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa kongkrit.³⁰

4. Tujuan Perizinan

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :³¹

- a. Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

- 1) Untuk melaksanakan peraturan

³⁰ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), h. 94.

³¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Afika, 2011), h. 200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

2) Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

b. Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk adanya kepastian hukum.
- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin

Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

5. Unsur-unsur Perizinan

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain :³²

³² Ridwan HR, *Op. Cit*, h. 201-204.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Instrumen Yuridis

Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau mentapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

b. Peraturan Perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahrhan Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

d. Peristiwa konkret

Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

e. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.

Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis (rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), substansi/format siaran (*content*), permodalan (*ownership*), serta proses dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Adapun macam-macam izin adalah sebagai berikut:³³

1. Izin Prinsip dan Izin Stasiun Radio

³³ www.kpi.go.id, di akses tanggal 12 Mei 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Izin Prinsip adalah hak yang diberikan oleh negara melalui KPI kepada lembaga penyiaran khususnya televisi untuk melakukan uji coba siaran sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan penyiaran. Setelah memperoleh izin prinsip, izin prinsip ini digunakan untuk mengurus proses penetapan frekuensi berupa izin stasiun radio (ISR). Izin Stasiun Radio (ISR) adalah izin yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel kepada lembaga penyiaran baik radio maupun televisi setelah memperoleh izin prinsip. ISR ini digunakan untuk mengurus sertifikasi alat. Setelah memiliki ISR dan sertifikasi alat, lembaga penyiaran bisa mengajukan kepada KPI untuk melakukan uji coba siaran.

2. Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh KPI kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

3. Izin Penyelenggaraan Penyiaran televisi swasta lokal, prosedurnya sama dengan lembaga penyiaran yang lainnya. Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh IPP diantaranya :

- a) Pengajuan proposal ke KPID.
- b) Verifikasi Administrasi oleh KPID.
- c) Verifikasi Faktual di lokasi penyiaran.
- d) Evaluasi Dengar Pendapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Rapat pleno KPID untuk memutuskan rekomendasi kelayakan.
- f) Rekomendasi kelayakan dikirim ke KPI Pusat dan Depkominfo.
- g) Pra Forum Rapat Bersama.
- h) Forum Rapat Bersama.
- i) Keputusan Rapat bersama dan dikeluarkannya IPP

6. Pada umumnya sistem izin terdiri dari :

- a. Larangan
- b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin)
- c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.³⁴

7. Prosedur Pemberian Izin

- a. Proses dan prosedur perizinan

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai : sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan

³⁴ Sri Prudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta : Grasindo, 2009), h.17-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontak fisik antar pihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

b. Persyaratan

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat.

Menurut Soehino, syarat-syarat izin bersifat konstitutif dan kondisional.

- 1) Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
- 2) Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

c. Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus kriteria:

- 1) Disebutkan dengan jelas.
- 2) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
- 3) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Biaya perizinan

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat:³⁵

- 1) Disebutkan dengan jelas.
- 2) Mengikuti standar nasional.
- 3) Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu.
- 4) Perhitungan berdasar pada tingkat *real cost*.
- 5) Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

8. Mekanisme Perizinan

Setiap lembaga penyiaran wajib terlebih dahulu memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sebelum melaksanakan aktivitas penyiaran. Untuk itu terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh izin tersebut. Namun, sebelum melakukan proses perizinan, harus diperiksa terlebih dahulu apakah terdapat peluang untuk menyelenggarakan lembaga penyiaran. Untuk mengetahui peluang tersebut, adalah kewajiban Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mengumumkan secara terbuka melalui media cetak dan/atau elektronik peluang penyelenggaraan penyiaran LPS dan LPB melalui teresterial secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali jasa penyiaran radio dan 10 (sepuluh) tahun sekali untuk jasa penyiaran televisi.³⁶

³⁵ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, h. 201-202.

³⁶ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam memperoleh izin yaitu:

1. Pembentukan Badan Hukum

Bagi LPS dan LPB, badan hukumnya harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat dengan akta notaris dan disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM. Hal terpenting dalam pembuatan akte notaris tersebut adalah badan hukum lembaga penyiaran merupakan badan hukum tunggal, sehingga dalam akta harus diterakan bahwa maksud dan tujuan pendirian perseroan adalah “mendirikan lembaga penyiaran “ yaitu lembaga penyiaran swasta” atau “lembaga penyiaran berlangganan”. Kemudian dicantumkan bahwa lembaga penyiaran ini akan menyelenggarakan “jasa penyiaran radio” atau “jasa penyiaran televisi”. Badan hukum tidak bisa membuka cabang untuk stasiun transmisi.³⁷

2. Membuat Permohonan dan Studi Kelayakan

Permohonan dibuat dalam dua rangkap, yang masing-masing permohonan ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dan Ketua Penyiaran Indonesia (KPI). Permohonan tersebut dilengkapi dengan proposal Studi Kelayakan yang dibuat pemohon dengan menguraikan berbagai hal, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan pendirian, visi dan misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan penyiaran, rencana kerja, aspek permodalan, proyeksi

³⁷ *Ibid.*, h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan (*revenue*) dari iklan dan pendapatan lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran, struktur organisasi mulai dari unit kerja terendah, program siaran yang terdiri dari uraian tentang waktu siaran, sumber materi mata acara siaran, keseluruhan dan rincian siaran musik, serta pola acara siaran harian dan mingguan, serta data teknik penyiaran. Permohonan dan Proposal disampaikan di sekretariat KPI Daerah (KPID) setempat.³⁸

3. Proses Verifikasi

Permohonan yang diterima oleh KPID selanjutnya dibagi dalam dua bentuk verifikasi. Yaitu, verifikasi administratif dan verifikasi program siaran. KPID akan menyerahkan proses verifikasi administratif. Verifikasi administratif dilakukan terhadap kelengkapan badan hukum, studi kelayakan, dan teknis. Sementara pemerintah melakukan verifikasi administratif, KPID akan melakukan verifikasi program siaran yang meliputi kelayakan program siaran, klasifikasi mata acara siaran, sasaran khalayak serta kelembagaan dalam pelaksanaan program siaran yang diverifikasi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Baik verifikasi yang dilakukan pemerintah maupun verifikasi yang dilakukan KPID berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari, namun dapat diperpanjang selama 15 (lima belas) hari jika terdapat hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Jika verifikasi oleh keduanya dinyatakan

³⁸ *Ibid.*, h. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterima maka proses dapat dilanjutkan, namun dinyatakan ditolak maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon.³⁹

4. Proses Evaluasi Dengar Pendapat

Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) adalah proses dengar pendapat di hadapan publik (*public hearing*) antara pemohon dan masyarakat sekitar yang menjadi target pemirsa atau pendengar yang dilaksanakan oleh KPID. Proses EDP hanya dapat dilaksanakan jika proses verifikasi administratif dan program siaran telah dilaksanakan dan bahwa permohonan telah dinyatakan dapat diteruskan oleh pemerintah daerah dan KPID.⁴⁰

5. Rekomendasi Kelayakan

KPID akan melaksanakan rapat internal untuk membahas hasil EDP untuk menetapkan apakah dapat memberikan Surat Rekomendasi Kelayakan kepada pemohon atau tidak. Jika tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh KPID, terutama bila publik memberikan respon negatif atau bahkan menolak rencana kebenaran lembaga penyiaran pemohon, maka KPID akan menyampaikan bahwa permohonan ditolak. Penolakan ini memberikan konsekuensi bahwa badan hukum yang mengajukan permohonan tidak dapat kembali mengajukan permohonan. Jika pihak-pihak yang terlibat masih berkeinginan mengajukan permohonan, masih dapat dimungkinkan dengan membentuk badan hukum baru dan memulai prosesnya kembali dari

³⁹ *Ibid.*, h. 72.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awal. KPI wajib memberitahukan secara tertulis kepada Menteri Kominfo tentang Permohonan yang dinyatakan tidak layak menyelenggarakan penyiaran dengan melampirkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh KPI.

Jika KPID menilai bahwa pemohon telah memenuhi syarat dan publik memberikan respon yang baik, maka KPID akan menerbitkan Surat Rekomendasi Kelayakan yang ditujukan kepada KPI Pusat (KPIP) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Rekomendasi tersebut tidak diperuntukkan bagi pemohon dan tidak dapat dijadikan sebagai “izin”.

6. Proses Forum Rapat Bersama

Setelah KPID menerbitkan Surat Rekomendasi, maka Menteri Kominfo wajib menyelenggarakan Forum Rapat Bersama (FRB). Dalam proses perizinan penyelenggaraan penyiaran untuk LPS, LPB dan LPK, Menteri dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja dan 7 (tujuh) hari bagi LPP Lokal, terhitung sejak diterimanya Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran dari KPI dengan persyaratan yang sudah lengkap mengundang KPI dan instansi terkait untuk mengadakan FRB.

FRB dilaksanakan secara tertutup, dipimpin oleh Menteri Kominfo atau yang diwakili serta didampingi oleh KPI. Agenda utama dalam FRB adalah memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran. Apabila satu wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan siaran jumlah rekomendasi kelayakan yang disampaikan oleh KPI kepada menteri Kominfo tidak melebihi jumlah frekuensi yang ditetapkan dalam peluang penyelenggaraan penyiaran, serta terpenuhinya persyaratan administrasi, program siaran, dan data teknik penyiaran, maka FRB menyetujui pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Bilamana pada satu wilayah layanan siaran jumlah rekomendasi kelayakan yang disampaikan oleh KPI kepada Menteri dan Kominfo melebihi jumlah frekuensi yang ditetapkan dalam peluang penyelenggaraan penyiaran, maka akan dibentuk Tim Seleksi, yang terdiri dari perwakilan PKI sebanyak 3 orang, perwakilan Direktorat Jenderal Sasaran Komunikasi dan Diseminasi Informasi sebanyak 2 orang, dan perwakilan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi sebanyak 2 orang. Pelaksanaan seleksi dilakukan dengan metode evaluasi komparatif, meliputi aspek program siaran, teknik penyiaran, dan bisnis. Tim Seleksi akan mengeluarkan hasil berupa ranking atau urutan terbaik berdasarkan penilaian Tim Seleksi. Hasil Tim Seleksi akan dibawa ke FRB berikutnya untuk menetapkan pihak yang berhak memperoleh IPP. Sebagai ilustrasi, jika peluang penyelenggaraan penyiaran hanya tersedia dua tempat dan jika rekomendasi KPI diberikan kepada empat pemohon, maka berdasarkan hasil Tim Seleksi IPP hanya akan diberikan kepada pemohon yang menduduki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peringkat pertama dan kedua, sementara yang ketiga dan keempat dinyatakan tidak lulus atau ditolak permohonannya.

Menteri Kominfo akan menyampaikan hasil FRB berupa IPP bagi pemohon yang dinyatakan memenuhi persyaratan atau bagi yang lolos dalam Tim Seleksi. Demikian pula, Menteri Kominfo akan menerbitkan surat penolakan permohonan IPP bagi pemohon yang permohonan izinnya tidak disetujui dalam FRB, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah keputusan FRB. Surat penolakan tersebut disampaikan oleh Menteri Kominfo kepada Pemohon melalui KPI.

7. Masa Uji Coba Siaran

Setelah FRB, Menteri dan Kominfo akan menerbitkan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPP Prinsip) bagi Pemohon yang permohonan izinnya disetujui dalam FRB, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah keputusan FRB. IPP Prinsip ini dapat digunakan oleh pemohon sebagai dokumen dan bukti untuk pengurusan izin-izin atau rekomendasi administratif, sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Tanda Daftar Gangguan (TDP) dalam memenuhi kelengkapan persyaratan IPP Tetap. Selain itu, IPP Prinsip merupakan dokumen dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, untuk pengurusan proses penetapan frekuensi berupa Izin Stasiun Radio (ISR), untuk pelaksanaan uji coba siaran, dan untuk evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IPP Prinsip disampaikan kepada Pemohon melalui KPI setelah ada bukti pembayaran biaya IPP Prinsip yang telah dibayarkan ke kas negara melalui rekening Bendahara Penerima Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi pada bank pemerintah. Setelah mendapatkan IPP Prinsip, Lembaga Penyiaran (LP) wajib melakukan masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan untuk Jasa Penyiaran Radio dan paling lama 1 (satu) tahun untuk Jasa Penyiaran Televisi, evaluasi. Selama masa berlakunya IPP Prinsip, LP dilarang melakukan perubahan terhadap data administrasi, program siaran dan data teknik penyiaran kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Kominfo.

Menteri uji coba siaran berupa konsistensi data sebagaimana yang telah diajukan pada saat permohonan dan pemenuhan persyaratan yang wajibkan dalam IPP Prinsip. Uji coba dilaksanakan pada saat LP sedang *on air* percobaan dan selama pelaksanaan uji coba siaran LP harus menyampaikan informasi secara lisan dan/atau tertulis kepada pendengar dan/atau pemirsa bahwa siaran dilaksanakan dalam rangka uji coba siaran.

Lembaga Penyiaran mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Kominfo untuk dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan uji coba berakhir. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa uji coba berakhir. Selama evaluasi uji coba siaran, LP menyelenggarakan siaran sesuai usulan program siaran dan teknik penyiaran dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

durasi paling sedikit 6 (enam) jam setiap hari untuk jasa penyiaran radio dan paling sedikit 1 (satu) jam setiap hari untuk jasa penyiaran televisi. LP yang dievaluasi diberi kesempatan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan sesuai kriteria penetapan lulus masa uji coba siaran selambat-lambatnya sebelum masa uji coba siaran berakhir. Selama masa uji coba siaran, Lembaga Penyiaran tidak boleh menyelenggarakan siaran iklan, kecuali siaran iklan layanan masyarakat, dan memungut biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran. Menteri Kominfo akan menetapkan kelulusan masa uji coba siaran berdasarkan rekomendasi Tim Evaluasi Uji Coba Siaran.

Tim Evaluasi uji coba siaran dapat memberikan rekomendasi kepada Lembaga Penyiaran yang tidak memenuhi kriteria evaluasi uji coba siaran untuk diberi kesempatan memenuhi kriteria evaluasi tersebut di atas dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan untuk jasa penyiaran radio dan 1 (satu) tahun untuk jasa penyiaran televisi. Tim Evaluasi uji coba siaran dapat memberi rekomendasi tidak lulus terhadap Lembaga Penyiaran yang tidak memenuhi kriteria evaluasi uji coba siaran dan telah melalui masa perpanjangan uji coba siaran. Jika LP dinilai gagal oleh Tim Evaluasi maka Menteri Kominfo mencabut Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima rekomendasi tidak lulus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sebelum melaksanakan uji coba siaran, Lembaga Penyiaran wajib terlebih dahulu mengurus Izin Stasiun Radio (ISR) pada direktorat spektrum frekuensi pada Kementrian Komunikasi dan Informatika. Mekanisme ISR dilengkapi dengan uji sertifikasi peralatan pemancar dan pembayaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHPF) yang telah ditetapkan pemerintah. Pengurusan ISR ini, bagi lembaga penyiaran teresterial, sangat erat kaitannya dengan notifikasi dan pencatatan pada daftar induk frekuensi di *International Telecommunication Union*. ISR dinyatakan tidak berlaku apabila Izin Penyelenggaraan Penyiaran dicabut akibat tidak lulus masa uji coba siaran.

8. Penetapan Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Jika Lembaga Penyiaran dinyatakan lulus oleh Tim Evaluasi Uji Coba Siaran maka Lembaga Penyiaran akan diberi Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran (IPP Tetap) dengan terlebih dahulu membayar Biaya IPP. Setelah pembayaran tersebut Menteri Kominfo akan menerbitkan keputusan izin tetap penyelenggaraan penyiaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah uji coba siaran dinyatakan lulus. Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran yang berlaku 5 (lima) tahun untuk jasa penyiaran radio dan 10 (sepuluh) tahun untuk jasa penyiaran televisi dan dapat diperpanjang. Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran disampaikan kepada Pemohon melalui KPI. Sejak diterbitkannya IPP Tetap tersebut, maka Lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyiaran secara resmi dan sah telah dapat melaksanakan kegiatan penyiaran.

9. Penyelenggaraan Penyiaran dan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Setelah resmi dan sah untuk melaksanakan kegiatan penyiaran, Lembaga Penyiaran wajib melaksanakan secara konsisten hal-hal yang telah disetujui selama masa proses pengajuan perizinan dan masa uji coba siaran. Bilamana terjadi perubahan dalam perjalanannya, misalnya struktur permodalan, pemegang saham, direksi atau program siaran, Lembaga Penyiaran wajib menyampaikan permohonan kepada Menteri Koinfo dan KPI. Lembaga Penyiaran tidak boleh menyimpang dari program siaran yang telah disetujui dan senantiasa berpedoman pada P3SPS.

Izin penyelenggaraan penyiaran dapat dicabut oleh Menteri Koinfo apabila Lembaga Penyiaran Swasta melanggar ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan, atau atas laporan KPI dinyatakan tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan, atau memindahtangankan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain, atau melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, atau melanggar ketentuan mengenai standar program siaran yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkan oleh KPI setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali oleh Pemohon. Perpanjangan izin harus dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran. Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin tertulis kepada Menteri Kominfo melalui KPI. Jangka waktu berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran radio 5 (lima) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran radio dan 10 (sepuluh) tahun untuk penyiaran televisi.

Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan perpanjangan izin tidak terpenuhi, KPI dan/atau Menteri Kominfo memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya agar persyaratan tersebut dilengkapi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan. Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan, KPI menerbitkan rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dan disampaikan kepada Menteri Kominfo. Selanjutnya Menteri Kominfo dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dari KPI mengundang KOI dan instansi terkait untuk mengadakan Forum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rapat Bersama. Menteri Kominfo dapat meminta penjelasan kepada KPI terhadap permohonan yang belum memperoleh rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Menteri Kominfo.

Forum Rapat Bersama diselenggarakan dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran melalui penilaian bersama terhadap rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama. Keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan oleh Menteri Kominfo paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ada kesepakatan dari Forum Rapat Bersama. Keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran disampaikan kepada Pemohon melalui KPI.⁴¹

Teori Penyiaran

1. Pengertian Penyiaran

Penyiaran adalah kegiatan pembuatan dan proses menyiarkan acara siaran radio dan televisi serta pengelolaan operasional perangkat lunak dan keras yang meliputi segi idiil, kelembagaan dan sumberdaya manusia untuk memungkinkan terselenggaranya siaran dan televisi.⁴²

⁴¹ Ibid., h. 73-81.

⁴² Severin, W.J dan J.W Tankard, *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode dan Terapan dalam Media Massa (edisi kelima)*, (Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2008), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyiaran atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *broadcasting* adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerimaan tersebut oleh pendengar/pemirsa di suatu tempat. Dari definisi umum ini, tampak bahwa arti penyiaran berbeda dengan pemancaran. Pemancaran sendiri berarti proses transmisi siaran, baik melalui media udara maupun medi kabel koaksial atau slauran fisik yang lain.

Sebagaimana bahasa aslinya, *broadcasting* penyiaran bersifat tersebar ke semua arah (*broad*) yang dikenal sebagai *omnidirectional*. Dari definisi sifat penyiaran ini bisa diketahui bahwa semua sistem penyiaran yang alat penerima sinyalnya harus dilengkapi dengan satu unit *decoder*, adalah kurang dengan definisi *broadcasting*. Oleh karena itu pada nama sistemnya diberi penambahan kata “terbatas”, sehingga menjadi sistem penyiaran terbatas.

- a. Siaran, Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar yang berbentuk garfis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
- b. Penyiaran, Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana di darat, di laut atau di antariska dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Lembaga Penyiaran, Lembaga penyiaran adalah penyelenggaraan penyiaran, baik lembaga penyiaran publik lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

2. Macam-macam Penyiaran

a. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) adalah lembaga penyiaran yang terbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. LPP ini terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia. Di daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal, dengan catatan tidak atau belum dilayani oleh RRI maupun TVRI setempat. LPP lokal merupakan lembaga penyiaran yang terbentuk badan hukum (berupa Peraturan Daerah) yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas usul masyarakat. Selain itu, ketersediaan kanal lokasi frekuensi serta sumber daya manusia yang dapat menjamin stabilitas operasional adalah persyaratan lain bagi LPP lokal. Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan

⁴³ Mohammad Musafir, *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal Di Bandar Lampung*, h.30-32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rakyat Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik ditingkat daerah diawasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari iuran penyiaran, Anggaran Pendapatan, dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.⁴⁴

b. Lembaga Penyiaran Swasta

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi. Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran. LPS adalah lembaga yang bersifat *profit oriented* atau bisnis murni, dengan modal awal dan pemegang sahamnya harus bersumber dari modal dalam negeri.⁴⁵

c. Lembaga Penyiaran Komunitas

Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas

⁴⁴ Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 66.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. LPK diselenggarakan tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata. Juga dimaksudkan untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa. LPK merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaan organisasinya tidak mewakili organisasi terlarang dan tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu. Dari sisa pembiayaan, LPK didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu. Selain itu juga dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. LPK dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing dan LPK dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.⁴⁶

d. Lembaga Penyiaran Berlangganan

Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) adalah penyelenggaraan penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyediakan jasa penyiaran berlangganan. LPB diselenggarakan berdasarkan klasifikasi: penyiaran

⁴⁶ *Ibid.*, h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlangganan melalui satelit, penyiaran melalui kabel, dan penyiaran berlangganan melalui teresterial. Dalam menyelenggarakan siarannya, LPB harus mempunyai izin atas setiap program siaran dalam setiap saluran, melakukan sensor internasional terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan, menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta, dan menyediakan 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) saluran siaran produksi dalam negeri. LPB melalui satelit, harus memiliki siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia, menggunakan satelit yang mempunyai *landing right* di Indonesia, dan menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan. Sedangkan LPB melalui kabel dan melalui teresterial harus memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan dan menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.⁴⁷

Penyiaran berasal dari kata *siar*, *siar* yang berarti menyebarluaskan informasi melalui pemancaran, kata *siar* ditambah dengan akhiran-an, membentuk kata benda siaran yang menurut Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif

⁴⁷ *Ibid.*, h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Siaran dapat berupa audio seperti radio. Dan dapat pula siaran audio visual gerak dan sinkron seperti televisi.

Adapun kegiatan penyiaran itu sendiri meliputi:

- 1) Merencanakan dan memproduksi acara;
- 2) Mengadakan atau menyiapkan program;
- 3) Menyiapkan pola acara, baik harian, mingguan, bulanan, triwulan, tengah bulan, dan seterusnya;
- 4) Menyelenggarakan siaran, baik artistik maupun jurnalistik;
- 5) Mengadakan kerjasama dengan lembaga penyiaran lain;
- 6) Mengadakan penelitian dan pengembangan;
- 7) Mengadakan pendidikan dan pengembangan siaran;
- 8) Mengadakan kerjasama dengan *production house*;
- 9) Menyelenggarakan pertukaran berita dan program dengan lembaga penyiaran baik dalam maupun luar negeri;
- 10) Mengadakan promosi dan penjualan program.

3. Media Penyiaran

a. Media Penyiaran Radio

Radio adalah media elektronik yang bersifat khas sebagai media audio. Oleh karena itu, ketika khalayak menerima pesan dari pesawat radio, khalayak pada tatanan mental yang pasif dan bergantung pada jelas tidaknya kata-kata yang diucapkan oleh penyiar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karakter khas radio dibandingkan dengan media massa lainnya, karakteristik khas Radio sebagai berikut:

- 1) **Imajinatif:** Karena hanya alat indera pendengaran yang digunakan khalayak dan pesannya pun selintas, maka pesan radio dapat mengajak komunikannya untuk berimajinasi. Radio bersifat *theatre of mind* artinya radio mampu menciptakan gambar (*makes picture*) dalam pikiran pendengar melalui kekuatan kata dan suara.
- 2) **Auditori:** Sifat ini muncul sebagai konsekuensi dari sifat radio yang hanya bisa didengar. Manusia mempunyai kemampuan mendengar yang terbatas, maka pesan komunikasi melalui radio diterima selintas. Pendengar tidak akan dapat mendengar kembali (*rehearing*) informasi yang tidak jelas diterimanya, karena ia tidak bisa meminta kepada komunikator/penyiar untuk mengulang informasi yang hilang kecuali ia merekamnya. Dengan perkataan lain, pesan radio disusun secara singkat dan jelas (*concise and clear*). Akrab/Intim: Sebagaimana dilakukan sehari-hari, kita jarang mendengar acara siaran radio secara khusus. Pada umumnya kita mendengar radio sambil melakukan kegiatan atau melaksanakan pekerjaan lainnya.
- 3) **Identik dengan Musik:** Radio adalah sarana hiburan termurah dan tercepat sehingga menjadi media utama untuk mendengarkan musik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) **Mengandung gangguan:** seperti timbul tenggelam/fading dan gangguan teknis (channel noise factor)

Adapun keunggulan atau kelebihan radio antara lain:

- a) **Cepat dan Langsung:** Radio adalah sarana tercepat, bahkan lebih cepat dari surat kabar atau dan televisi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa lewat proses yang kompleks dan butuh waktu yang lama seperti TV dan media cetak.
- b) **Akrab:** Radio adalah alat yang “mendekatkan” atau mengakrabkan pendengar/khalayak dengan penyiar bahkan dengan pemiliknya. Orang cenderung jarang mendengarkan siaran radio secara berkelompok akan tetapi justru orang seringkali mendengar radio secara sendirian.
- c) **Hangat:** Perpaduan antara kata-kata, musik, dan efek suara dalam siaran radio mampu mempengaruhi emosi pendengar. Pendengar akan bereaksi atas kehangatan suara penyiar dan seringkali pendengar berpikir bahwa penyiar adalah sebagai teman bagi mereka.
- d) **Tanpa batas:** Siaran radio mampu menembus batas-batas geografis dan kultural serta kelas sosial. Bahkan hanya orang “tunarungu” yang tidak mampu menikmati sebuah siaran radio.
- e) **Murah:** Harga dari pesawat radio sekaligus mendengarkan siarannya relatif jauh lebih murah dibandingkan dengan harga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah televisi atau berlangganan media cetak. Bahkan pendengar siaran radio pun tidak dipungut iuran sepeser pun.

- f) **Fleksibel:** Siaran radio bisa dinikmati sambil mengerjakan hal lain atau tanpa mengganggu aktivitas lain seperti belajar, memasak, mengemudi, membaca surat kabar, dan sebagainya.

Adapun kelemahan dari radio adalah sebagai berikut :

- a) **Selintas:** Siaran radio cepat hilang dan mudah dilupakan. Pendengar tidak bisa mengulang apa yang didengarnya, tidak seperti pembaca surat kabar yang bisa mengulang bacaannya dari awal tulisan.
- b) **Batasan Waktu:** Waktu siaran radio relatif terbatas hanya 24 jam sehari, berbeda dengan surat kabar yang bisa menambah jumlah halaman dengan bebas.
- c) **Beralur Linier:** Program disajikan dan didengar oleh khalayak berdasarkan urutan yang sudah ada (*rundown*)

b. Media Penyiaran Televisi

Televisi merupakan media yang dapat mendominasi komunikasi massa karena sifatnya yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan khalayak.

Karakter khas Televisi adalah sebagai berikut :

- 1) **Audiovisual:** Televisi memiliki kelebihan dapat didengar (audio) dan dilihat (visual), karena sifatnya tersebut televisi menampilkan informasi-informasi yang disertai gambar, baik gambar diam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti foto, gambar peta maupun film berita yaitu rekaman peristiwa.

- 2) **Berpikir dalam gambar:** Ada 2 tahap yang dilakukan dalam proses ini. Pertama, visualisasi yaitu menerjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan yang menjadi gambar-gambar. Kedua, penggambaran (*picturization*) yakni kegiatan merangkai gambar-gambar individual sedemikian rupa sehingga kontinuitas mengandung makna tertentu.

Beberapa kekuatan dari televisi dapat disebutkan, sebagai berikut:

- a) Detail (audio/visual);
- b) Daya ransangan yang tinggi (informasi, iklan dan program);
- c) Teknologi tinggi (*digital, streaming*) ;
- d) Menggoda;
- e) Mudah ditiru;
- f) Jangkauan luas (nasional, regional dan internasional) ⁴⁸

Penyiaran intinya adalah proses penyampaian pesan melalui media massa elektronik kepada khalayak dalam hal ini penyiaran Televisi dan Radio sebagai alat untuk membantu menyampaikan informasi tentang kebijakan dan program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah agar sistem pemerintahan daerah dapat berjalan secara lebih efisien. Di dalamnya ada hal utama yaitu penyiaran sebagai alat bantu dan pemanfaatannya menjadi pelayanan pemerintahan berjalan lebih efisien. Dalam konsep

⁴⁸ <https://dinus.ac.id> Materi Kuliah I Dasar-dasar Penyiaran, 2016, diakses tanggal 20 Mei 2019, jam 13:10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyiaran, masyarakat masih bisa secara interaktif memberikan masukan, saran, harapan dan kritikan kepada pemerintah daerah sehingga keberadaan Televisi dan Radio pemerintah daerah dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lainnya.⁴⁹

Tinjauan Umum Tentang Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio

1. Persyaratan Permohonan Izin Stasiun Radio Baru

a. Badan Hukum

- 1) Surat permohonan ditunjukkan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- 2) Surat pernyataan kesanggupan membayar BHP Frekuensi Radio;
- 3) Salinan Akta Pendirian Badan Hukum dan Akta Perubahan beserta pengesahannya;
- 4) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5) Formulir permohonan ISR yang telah diisi secara lengkap dan benar;
- 6) Gambar konfigurasi jaringan komunikasi dan peta lokasi.
- 7) Data/brosur spesifikasi teknis perangkat radio dan antena. Perangkat yang akan digunakan telah memiliki sertifikasi perangkat dari Ditjen SDPPI;
- 8) Salinan izin prinsip atau izin penyelenggara telekomunikasi dan izin penyelenggaraan penyiaran bagi penyelenggara penyiaran.

⁴⁹ Wahyudi, *Dasar-Dasar Jurnalistik Radio dan Televisi*, (Jakarta : Penerbit Grafiti, 1996), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Instansi Pemerintah

- 1) Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- 2) Surat pernyataan kesanggupan membayar BHP Frekuensi Radio;
- 3) Salinan dokumen penetapan organisasi bagi instansi pemerintah;
- 4) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5) Formulir permohonan ISR yang telah diisi secara lengkap dan benar;
- 6) Gambar konfigurasi jaringan komunikasi dan peta lokasi.
- 7) Data/brosur spesifikasi teknis perangkat radio dan antena. Perangkat yang akan digunakan telah memiliki sertifikasi perangkat dari Ditjen SDPPI;
- 8) Salinan izin prinsip atau izin penyelenggara telekomunikasi dan izin penyelenggaraan penyiaran bagi penyelenggara penyiaran.

2. Tata Cara Permohonan Izin Stasiun Radio Baru

Permohonan ISR dapat diajukan secara:

- 1) Daring (*online*), yaitu peizinan elektronik melalui web yang disediakan oleh Ditjen SDPPI; atau
- 2) Luring (*offline*), yaitu perizinan melalui surat tertulis atau melalui Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI;
- 3) Antar muka mesin (*machine to machine interface*).

Pemohon ISR disarankan untuk menggunakan fasilitas perizinan elektronik melalui web (*elicensing*), sedangkan sarana perizinan melalui antar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muka mesin (*machine to machine interface*) atau Sistem M2M diperuntukan bagi pengguna frekuensi radio yang memiliki data perizinan frekuensi radio yang besar (*Big User*).

Permohonan ISR Dinas Tetap dan Bergerak Darat yang disampaikan secara luring akan diproses melalui fasilitas *elicensing* oleh petugas internal Ditjen SDPPI. Namun demikian, permohonan ISR yang disampaikan secara luring diperlukan waktu verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan data parameter teknis serta *data entry* yang dilakukan secara manual, sedangkan permohonan ISR yang disampaikan secara daring (*elicensing*), verifikasi dan validasi data administrasi dan data parameter teknis dilakukan secara otomatis oleh sistem, sehingga pemohon dapat mengetahui sadari dini apabila ditemukenal terdapat persyaratan yang belum lengkap sampai dengan permohonan ISR dinyatakan lengkap.

Tahapan proses perizinan ISR Dinas Tetap dan Bergerak Darat, sebagai berikut:

- 1) Pemohon mengajukan surat permohonan ISR beserta kelengkapan persyaratan;
- 2) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data parameter teknis. Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan ISR dinyatakan lengkap, dilakukan *data entry* pada Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS). Untuk permohonan ISR yang disampaikan melalui *elicensing*, pemohon memasukkan data permohonan ISR sendiri secara online dan verifikasi kelengkapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan administrasi serta validasi kesesuaian data teknis dilakukan secara otomatis oleh sistem sehingga dapat diketahui secara langsung oleh pemohon;

- 3) Analisa teknis ketersediaan kanal frekuensi radio yang bebas dari gangguan (*harmful interference*);
- 4) Otoritas persetujuan penerapan ISR dan penerbitan SPP BHP Frekuensi Radio. Masa laku SPP BHP Frekuensi Radio untuk ISR Baru adalah 30 hari kalender sejak diterbitkan. SPP BHP Frekuensi Radio dapat diunduh sendiri oleh pemohon melalui *elicensing* atau diminta melalui Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI serta UPT Ditjen SDPPI (Balmon/Lokal/Posmon) setempat. Dalam hal pemohon tidak melakukan pembayaran BHP Frekuensi Radio, maka penetapan ISR dibatalkan;
- 5) Pembayaran BHP Frekuensi Radio oleh pemohon melalui *host-to-host* Bank Mandiri atau Bank BNI;
- 6) Penertiban ISR; Pendistribusian ISR bagi pemohon di daerah dilakukan melalui UPT Ditjen SDPPI (Balmon/Lokal/Pasmon) setempat.⁵⁰

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio Pasal 22 tentang Tata Cara Perizinan sebagai berikut:

⁵⁰ www.postel.go.id/artikel - izin - spektrum - frekuensi - radio - tata - cara - persyaratan, diakses tanggal 23 Juli 2019, jam 21: 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Menteri mengumumkan peluang penyelenggara penyiaran LPS dan/atau LPB melalui terrestrial.
- (2) Pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran LPS dan/atau LPB melalui terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka pada situs resmi Kementrian, media cetak, dan/atau media elektronik.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 1) Wilayah layanan siaran; 2) Jangka waktu pengajuan permohonan; dan 3) Jumlah ketersediaan kanal frekuensi radio.
- (4) Pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk keperluan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dan/atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵¹

Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio Pasal 23 tentang Tata Cara Perizinan sebagai berikut :

- (1) Permohonan IPP untuk LPS dan LPB melalui teresterial diajukan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b;
- (2) Permohonan IPP untuk:
 - a. LPB melalui satelit;

⁵¹ Pasal 22 Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. LPB melalui kabel;
- c. LPP Lokal; atau
- d. LPK,

Dapat diajukan tanpa adanya pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran.

(3) Menteri dapat melakukan penghentian sementara (*moratorium*) permohonan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:

- a. Persaingan usaha yang sehat;
- b. Perlindungan investasi;
- c. Daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju;
- d. Kepentingan daerah;
- e. Perbandingan ketersediaan layanan (*supply side*) dengan kebutuhan masyarakat (*demand side*) yang berimbang; dan/atau;
- f. Efisiensi nasional.

(4) Permohonan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui KPI Daerah.

Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio Pasal 24 tentang Tata Cara

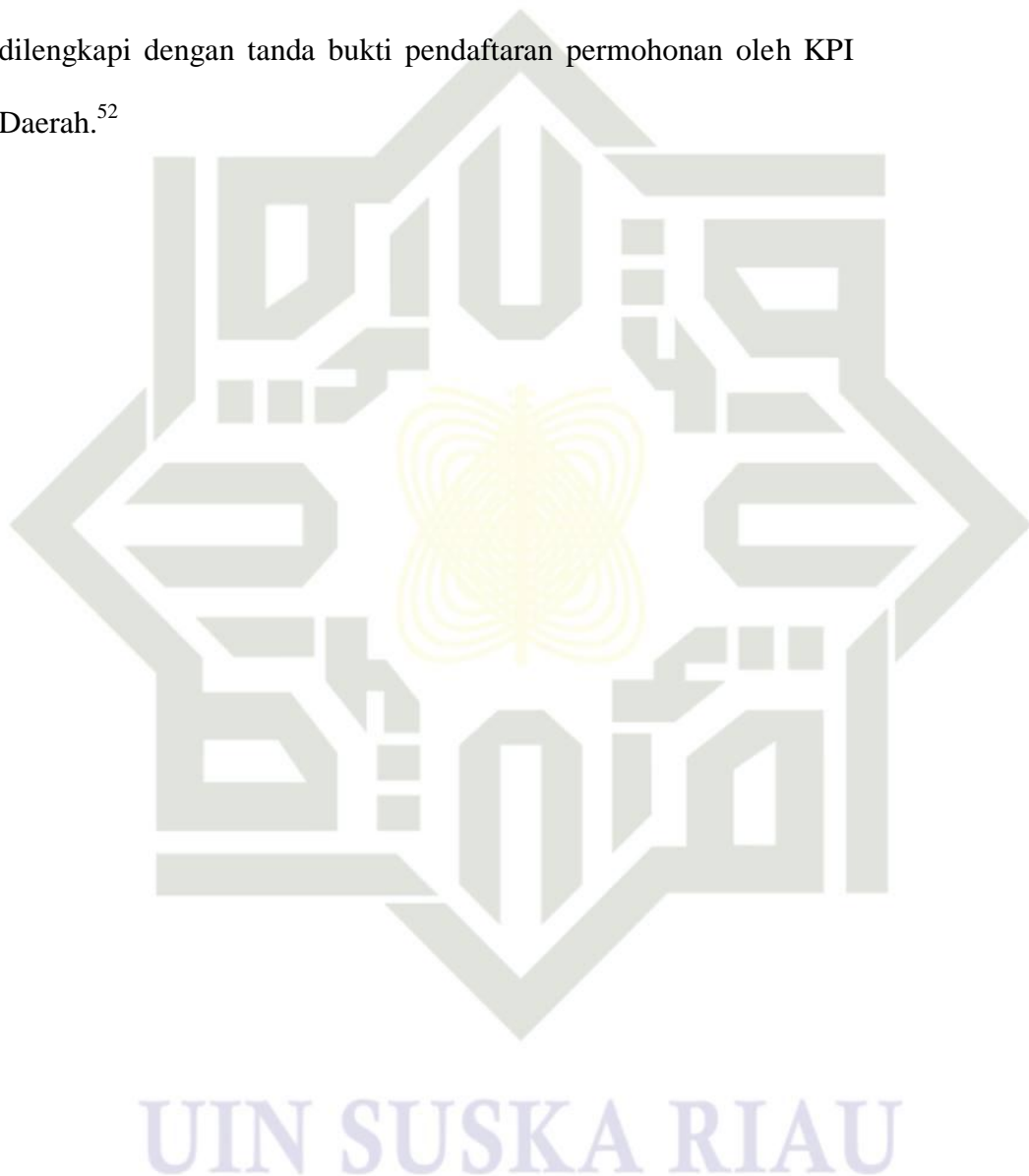
Perizinan sebagai berikut :

- (1) Permohonan IPP sbagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu) berkas untuk KPI Daerah dan 1 (satu) berkas untuk Menteri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) KPI Daerah meneruskan berkas permohonan kepada Menteri melalui KPI Pusat paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh KPI Daerah.
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan tanda bukti pendaftaran permohonan oleh KPI Daerah.⁵²



⁵² Pasal 22 Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Izin Perizinan Penyiaran Radio.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio di Kabupaten Kampar penulis menarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio di Kabupaten Kampar belum terlaksana karena masih terdapat beberapa radio yang belum mendapatkan izin, tetapi masih tetap melakukan penyiaran dan menggunakan Frekuensi radio.
2. Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio di Kabupaten Kampar yaitu dalam sosialisasi, karena saat Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio di berlakukan KPID Provinsi Riau hanya beberapa kali melakukan sosialisasi di karenakan tidak semua perwakilan dari lembaga penyiaran yang hadir, ketidak pahaman calon lembaga penyiaran radio terhadap prosedur perizinann penyiaran radio FM dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kedua adanya syarat pembentukan badan hukum yang membutuhkan waktu dan proses yang lama untuk membentuk dan mengurusnya, kendala teknis dilapangan, untuk melengkapi syarat-syarat yang sudah di tentukan sangat sulit untuk dilengkapi. Karena masjid islamic tempat Radio islamic FM ini bersiaran berada dibawah pemerintah daerah dan semua pendanaan pemerintah daerah yang mengeluarkan.

Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas mengenai Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio di Kabupaten Kampar yaitu sebagai berikut :

1. Lembaga Penyiaran disampaikan dapat melaksanakan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio di Kabupaten Kampar.
2. Lembaga Penyiran disarankan dapat hadir dalam melakukan sosialisasi yang dilaksanakan KPID Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad, *Menguak Takbir Hukum, (Satu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Gunung Agung, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2010.
- Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.
- Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2011.
- Atmosudirjo Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Fahmi, Sudi, *Hukum Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Total Media, 2010.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2011.
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Philipus, M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, 1993.
- Pradyatmoko Sri, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, Grasindo, 2009.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Severin, W.J dan J.W Tankard, *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode dan Terapan didalam Media Massa (edisikelima)*, Jakarta, Kencana Predana MediaGroup, 2008.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahyudi, *Dasar-Dasar Jurnalistik Radio dan Televisi*, Jakarta, Penerbit Grafiti, 1996.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio.

Peraturan menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Organisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Peraturan Lembaga Penyiaran Indonesia Nomor 3P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggara Penyiaran.

Profil Kabupaten Kampar Tahun 2019.

Mohammad Musafir, *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal Di Bandar Lampung*, 2010.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/ Kabupaten Kampar](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar) diakses tanggal 26 April 2019.

<https://www.postel.go.id> Laporan Tahunan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio diakses tanggal 11 Juli 2019.

[https://www. kpi.go.id](https://www.kpi.go.id), di akses tanggal 12 Mei 2019.

<https://dinus.ac.id> Materi Kuliah I Dasar-dasar Penyiaran, 2016, diakses tanggal 20 Mei 2019

www.postel.go.id/artikel - izin - spektrum – frekuensi – radio – tata – cara – persyaratan, diakses tanggal 23 Juli 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, “Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio Di Kabupaten Kampar” yang ditulis oleh :

Nama : SILVIA EFENDI
NIM : 11527203137
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2019
Waktu : Jam, 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Oktober 2019
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH.

Sekretaris
Joni Alizon, SH., MH.

Penguji 1
Muslim, S.Ag., SH., M.Hum.

Penguji 2
Dr. H. Abu Samah, MH.

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum


Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul “ Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio Di Kabupaten Kampar”, ditulis oleh saudara :

Nama : SILVIA EFENDI
NIM : 11527203137
Program Studi : ILMU HUKUM
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : RABU/ 10 APRIL 2019
Narasumber : Lysa Angrayni., SH.,MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

ASFENDI, S.Ag. Msi
NIP. 19610918 198803 1 002

Pekanbaru, 11 April 2019
Narasumber

LYSA ANGRAYNI., SH.,MH
NIP. 19790131 200604 2 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/5184/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
menerangkan bahwa :

Nama : SILVIA EFENDI
N I M : 11527203137
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

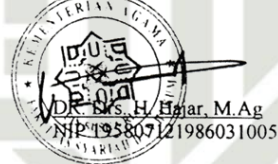
UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : **30 APRIL 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 27 Mei 2019

Dekan,



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrasno No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4160/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 09 Mei 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SILVIA EFENDI
NIM : 11527203137
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : -KPID PROVINSI RIAU,
-BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I
PEKANBARU
-RADIO ISLAMIC KABUPATEN KAMPAR

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:PELAKSANAAN PERIZINAN PENYIARAN RADIO BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERSYARATAN TATA CARA
PERIZINAN PENYIARAN RADIO DI KABUPATEN KAMPAR

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 0051

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email: admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Silvia Efendi

NIM : 11527203137

Jurusan : Ilmu Hukum


Judul : Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran
Radio Di Kabupaten Kampar

Pembimbing : Dr. Abu Samah, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 09 Oktober 2019

An. Pimpinan Redaksi


M. Alpi Syahril, SH., MIl., CPL
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PEKANBARU

Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia

KOMINFO

Jl. Soekarno Hatta (Arengka Atas) No. 244 Pekanbaru 28294 Telp. (0761) 65735 Fax. (0761) 61540 www.postel.go.id

Nomor : 107.9/Balmon.14/UM.01.01/05/2019
 Sifat : Segera
 Lampiran : ---
 Hal : Izin Melakukan Riset/Penelitian

Pekanbaru, 27 Mei 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Di
 Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat Saudara tanggal 09 Mei 2019 Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4160/2019 Perihal Mohon Izin Riset, pada prinsipnya kami menyetujui untuk melakukan riset/penelitian tersebut di kantor kami, dan kepada saudara **SILVIA EFENDI** dengan NIM : 11527203137 silahkan dan segera melakukan riset/penelitian sesuai dengan surat yang saudara ajukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ka. Balmon Frek Kelas I Pekanbaru


KGS A. SAZILI
 NIP. 196902181992031001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BADAN PENGELOLA MARKAZ ISLAMY KABUPATEN KAMPAR

Sekretariat : Jl. Prof. M. Yamin, SH No.01 Telp. (0762) 21897 Bangkinang

SURAT KETERANGAN

No : 011/BP-MIK/KPR/1508/4019

Ketua Masjid Al-Ihsan Markaz Islamy Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan :

Nama : Silvia Efendi
 NIM : 11527203137
 Program Studi : S1
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dan mengumpulkan data sehubungan dengan penelitian yang berjudul **"PELAKSANAAN PERIZINAN PENYIARAN RADIO BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PERSYARATAN TATA CARA PERIZINAN PENYIARAN RADIO DI KABUPATEN KAMPAR"**.

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 15 Agustus 2019

An. Ketua Markaz Islamy

Kab. Kampar

Sekretaris



JON KANEDI, M.E.Sy

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/22637
 TENTANG



032010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4160/2019 Tanggal 9 Mei 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

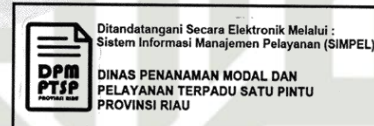
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | SILVIA EFENDI |
| 2. NIM / KTP | : | 11527203137 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PERIZINAN PENYIARAN RADIO BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERSYARATAN TATA CARA PERIZINAN PENYIARAN RADIO DI KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KPID PROVINSI RIAU 2. BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PEKANBARU 3. RADIO ISLAMIC KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Mei 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau
3. Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kota Pekanbaru
4. Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
6. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/389
Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN RISET/22637 tanggal 10 Mei April 2019 dengan ini memberi Rekomendasi / Izin Penelitian kepada :

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : SILVIA EFENDI |
| 2. NIM | : 11527203137 |
| 3. Universitas | : UIN |
| 4. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PERIZINAN PENYIARAN RADIO BERDASARKAN PERATURAN MENTRI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERSYARATAN TATA CARA PERIZINAN PENYIARAN RADIO DI KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : RADIO ISLAMIC KABUPATEN KAMPAR |

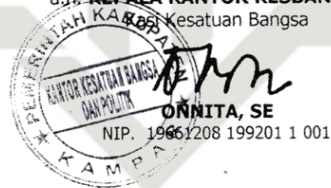
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 14 Mei 2019

a.n. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL**
Kesatuan Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Pimpinan Radio Islamic Kab. Kampar di Bangkinang Kota
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



SILVIA EFENDI, lahir di Bukittinggi, pada tanggal 27 Februari 1996 merupakan anak pertama dari 4 (empat) bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Elva Efendi dan Ibunda Erliwati. Penulis memulai pendidikan dari Sekolah Dasar Negeri 001 Rambah, Pasir Pangaraian dan menyelesaikan pendidikan dasar tersebut pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke tingkat pertama yaitu pada SMP Negeri 001 Rambah, Pasir Pangaraian dan lulus pada tahun 2012. Setelah lulus dari sekolah tingkat pertama kemudian melanjutkan ke tingkat atas di SMA Negeri 1 Rambah, Pasir Pangaraian dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu pada tahun 2015 penulis mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan lulus di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Pada tahun 2018 penulis melakukan magang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pada tahun 2016 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) di Desa Rambah Baru, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian Penulis melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul : “Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio Di Kabupaten Kampar”. Penulis mengikuti Sidang Munaqasyah yang dilaksanakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum pada hari Selasa, 22 Oktober 2019 dan dinyatakan lulus dengan IPK 3.35.